



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini :

5.1.1. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

.Berdasarkan hasil perhitungan yang penulis buat hasil kinerja keuangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan pendapatan daerah baik, dari semua variabel yang di teliti dari secara keseluruhan tahun 20018-2019

mengalami peningkatan karena realisasi tercapai melebihi targetnya, namun di tahun 2020 mengalami sedikit tekanan dibagian pendapatan dengan demikian juga mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah di tahun 2020.

5.1.2. Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Secara keseluruhan kinerja keuangan belanja daerah dari tahun 2018-2020 sudah baik, di lihat dari rasio variannya dimana dari tahun ke tahun mengalami kinerja yang menguntungkan.

5.1.3. Kinerja Keuangan Pembiayaan Daerah

Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Kinerja Keuangan Pembiayaan Daerah khususnya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Pemerintah Daerah kabupaten dan Kota di DIY bersaldo positif

5.2. Saran

Saran yang dapat ditarik dari kesimpulan adalah :

- 1) Untuk Pemda Berdasarkan hasil analisis serta kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah perlu lebih berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalan potensi-potensi

baru daerah dan pengembangan potensi daerah. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah:

- Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak. Tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyeteroran
 - Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang objektif berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untukantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pungutan PAD oleh aparat.
- b. Pemerintah Daerah perlu mencari alternatif lain untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melihat kondisi dan potensi yang dimiliki, sehingga tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat tidak semakin besar. Peningkatan PAD diharapkan tidak menghambat investor untuk menanamkan modalnya. Pemerintah seharusnya dapat meningkatkan investasi dengan memberikan insentif bagi investor yang akan menginvestasikan modalnya ke Kabupaten dan Kota di DIY, dengan demikian maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka PAD juga akan meningkat. Peran swasta melalui UMKM juga perlu

- ditingkatkan dengan mengadakan kerja sama dengan pemerintah daerah melalui pengembangan ekonomi lokal.
- c. Pemerintah daerah hendaknya tidak hanya fokus dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam waktu yang cepat, tetapi harus memperhatikan pemerataan pembangunan, karena strategi pengembangan tersebut sangat rapuh dan peka terhadap faktor eksternal apun perubahan ekonomi dari luar wilayah.
- 2) Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya mengambil 3 tahun saja, namun kedepannya pra dan pasca pandemi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik D.I.Y. 2021. Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta (Jiwa), 2018-2020. Diakses pada tanggal 13 Desember 2021 melalui url : <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html>
- BAPPEDA DIY. 2021. Kontribusi Sektor terhadap PDRB. BAPPEDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/414-

kontribusi-sektor-terhadap-pdrb.

Basri, Muhammad Chatib., Rahardja, Sjamsu., Fitriana, Syarifah, Namira Fitriana. 2016.

Not a Trap, But Slow Transition? Indonesia's Pursuit to High Income Status. Asian Economic Papers Vol.15, (2), halaman 1 - 22.

Bisma, I Dewa Gde dan Susanto, Hery.2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007.*Jurnal Ganec Swara* Edisi Khusus Vol 4 No. 3.

Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan. Indeks : Jakarta.

Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. 2020. Statistik Kepariwisataaan. Yogyakarta.

DPRD DIY. 2021. Sektor Pariwisata dan Pendidikan dapat Dukung Pemulihan Perekonomian DIY. <https://www.dprd-diy.go.id/sektor-pariwisata-dan-pendidikan-dapat-mendukung-pemulihan-perekonomian-diy/> Diakses 6 Mei 2021.

Dwina, Irma. 2020. "Melemahnya Ekonomi Indonesia pada Sektor Pariwisata Akibat Dampak dari Pandemi COVID-19. *Journal of SocArXiv* doi:10.31235/osf.io/8e27t.

Hendro Sumarjo. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

- Hizbaron, Dyah Rahmawati., Ruslanjari, Dina., dan Mardiatno, Djati. 2021. Amidst Covid-19 Pandemic: An Adaptive Disaster Governance in Yogyakarta, Indonesia. *Social Sciences Journal* Vol. 10 (92), halaman 1-18.
- Ibnu Syamsi. 1986. *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional*. Jakarta:CV Rajawali.
- Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY. 2020. Kajian Fiskal Regional Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan I Tahun 2020. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kurniawan, Robi dan Managi, Shunsuke. 2018. *Economic Growth and Sustainable Development in Indonesia: An Assessment*. *Bulletin of Indonesia Economic Studies Journal*. Vol. 54 (3), halaman 339-361.
- Leasiwal, Teddy Christianto. 2013. The Analysis of Indonesia Economic Growth: A Study in Six Big Island in Indonesia. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, Vol. 16 (1), halaman 1-12.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Soleh, Ahmad. 2014. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 (2), halaman 197-209.

Sultan, Andi Tanra., Ruslan, Mukhlis., Nur, Indrayani. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone. *Jurnal Riset Edisi IV UNIBOS Makassar* Vol. 3 (4), halaman 38-49.

Zukhri, Nizwan. 2020. Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(2), halaman 143-149.

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

